



Mewujudkan Yogyakarta Sebagai Kota Layak Anak

Yulianingsih

Tahun lalu, Kota Yogyakarta dikukuhkan sebagai kota layak anak. Tahun ini Pemkot Yogyakarta tengah berusaha agar kota ini menjadi kota layak anak tingkat madya atau satu tingkat dari predikat tahun sebelumnya.

Bukan hal yang mudah untuk mewujudkan hal tersebut, namun Pemkot Yogyakarta optimis hal tersebut bisa terwujud. Pasalnya, Pemkot setempat telah membuat berbagai program baik fisik maupun non fisik untuk mendukung visi tersebut.

Dari sisi kebijakan yang menjadi payung terhadap semua program yang berpihak pada pemenuhan hak anak sedikitnya ada sembilan peraturan daerah (Perda) di Kota Yogyakarta. Perda itu masih diperkuat dengan 47 peraturan wali kota untuk implementasinya dan tujuh perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak.

Menurut Wakil Walikota Yogyakarta, Imam Priyono di Kota Yogyakarta juga telah dibentuk gugus tugas kota layak anak dengan landasan hukum Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 535/KEP/2011 dan telah ada Rencana Aksi Daerah (RAD) mengenai Kota Layak Anak untuk periode tahun 2012-2016. Selain itu juga ada Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 98 /KEP/2010 tentang pembentukan forum anak kota Yogyakarta yang kemudian dijabarkan oleh setiap kecamatan dengan membentuk forum anak di setiap kecamatan di Kota Yogyakarta. "Kebijakan ini dibuat sebagai komitmen kita terhadap pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik di Kota Yogyakarta," tegasnya.

Di bidang pendidikan di Kota Yogyakarta juga telah dilakukan sejak dini dengan adanya pendidikan anak usia dini (PAUD) di tiap rukun warga. Di Kota Yogyakarta terdapat 622 PAUD dan 36 di antaranya sudah berubah menjadi Kelompok Belajar, serta enam PAUD inklusi. Selain itu, juga ada 630 Posyandu.

Sementara menurut Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Yogyakarta Sri Adiyanti, saat ini pihaknya tengah menyusun draft indikator kampung ramah anak sesuai lima aspek penilaian yang telah ditetapkan untuk melakukan verifikasi Kota Layak Anak.

"Jika dari pusat memulai penilaian dari tingkat kota/kabupaten, maka Yogyakarta berinisiatif melakukannya dari tingkat kampung hingga nanti bisa terwujud kota yang layak anak," terangnya.

Pada 2013, indikator tersebut diharapkan sudah dapat diwujudkan dalam sebuah peraturan wali kota dan digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap setiap kampung. Pada 2012 ini di Yogyakarta sudah ada dua kampung ramah anak, yaitu di Badran dan Sodagaran.

Ketua Tim Verifikasi Kota Layak Anak, Soepalarto mengatakan pihaknya tengah mendorong Kota Yogyakarta untuk menjadi Kota Layak Anak kategori madya atau naik dibanding predikat yang telah diterima kota ini pada 2009, yaitu kategori pratama. "Ada lima aspek penilaian yang akan menjadi parameter saat verifikasi. Secara administrasi, Kota Yogyakarta bisa didorong menuju Kota Layak Anak kategori madya," katanya.

Diakuiinya, Yogyakarta cukup mampu memberikan berbagai hak anak seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial meskipun masih ada sejumlah kekurangan seperti penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Dari hasil verifikasi awal,

Dihaturkan Kepada Yth:

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth.:

	Instansi	Nilai Berita	
1.		☐ Negatif	
2.		☐ Positif	

lanjutnya, kekurangan sarana dan prasarana pendukung untuk memenuhi hak anak tersebut di antaranya adalah pojok laktasi di lokasi-lokasi pelayanan publik serta belum adanya sekolah yang berpredikat sekolah ramah anak. "Untuk menjadi kota yang benar-benar layak anak, memang sangat sulit dilakukan. Semua

pihak harus bisa bekerja keras untuk mewujudkannya," tambahnya.
Di Indonesia, lanjut dia, belum ada kota atau kabupaten yang memperoleh predikat sebagai Kota Layak Anak. "Yang ada baru predikat menuju Kota Layak Anak, termasuk di Yogyakarta," kata Anggota Tim Verifikasi Kota Layak Anak, Kurniasih.

Lima aspek yang akan dinilai dalam verifikasi Kota Layak Anak tersebut adalah, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan serta kegiatan seni budaya, sarana dan prasarana.

■ ed: heri purwata

Kota Yogyakarta telah membentuk gugus tugas kota layak anak dengan landasan hukum Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 535/KEP/2011.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Imam Priyono



Kota Yogyakarta belum memiliki pojok laktasi di setiap lokasi pelayanan publik.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005